

# Analisis Implementasi, Inkonsistensi dan Implikasi Desain *Signage* Berbasis Keberlanjutan Instansi Pemerintah di Bali

I Made Aditya Widarma, Ni Made Emmi Nutrisia Dewi, I Putu Gede Suyoga

Program Magister Desain Institut Desain dan Bisnis Bali  
Jl. Tukad Batanghari No. 29 Panjer, Denpasar, Bali, Indonesia  
*Email:* aditwi.made@gmail.com

## ABSTRAK

Bali memiliki fenomena yang unik pada rupa papan nama kantor instansi pemerintah di Bali. Papan nama kantor atau disebut *signage* memiliki desain visual yang terikat peraturan pemerintah dalam bentuk Peraturan Gubernur. Hal ini berdampak pada desain *signage* yang menggunakan latar gradasi merah putih dengan teks aksara Bali dan huruf Latin berwarna hitam. Namun, setelah beberapa tahun terdapat beberapa permasalahan pada fenomena ini, antara lain hasil implementasi desain *signage*, faktor-faktor inkonsistensi desain *signage*, dan implikasi berkelanjutan desain *signage* antar instansi pemerintah di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi desain *signage* serta melakukan evaluasi terhadap desain tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Campuran dengan pendekatan Desain Penjelasan Berurutan dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori *Signage and Wayfinding*, teori *Gestalt*, dan Teori Desain Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya peran desainer dalam proses penciptaan Instruksi Gubernur yang mengakibatkan desain pedoman yang terkesan inkonsisten yang memberikan implikasi penafsiran ambigu antar instansi pemerintah di Bali serta desain yang kurang membantu pengguna jalan. Desain *signage* dapat dievaluasi dengan pemilihan panduan desain yang komprehensif dan komunikasi panduan yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap desain *signage* yang lebih akomodatif bagi pengguna jalan terutama di sekitar instansi pemerintah di Bali.

**Kata-kata kunci:** desain; implementasi; *signage*; bali

## ABSTRACT

*Bali has a unique phenomenon in the appearance of government office signage in Bali. Office signage or called signage has a visual design bound by government regulations in the form of a Governor's Regulation. This has an impact on the design of signage using a red and white gradient background with Balinese script and black Latin letters. However, after several years there have been several problems in this phenomenon, including the results of the implementation of signage design, factors of inconsistency in signage design, and the sustainable implications of signage design between government agencies in Bali. This study aims to determine the implementation of signage design and conduct an evaluation of the design. The method used in this study is a Mixed Method with a Sequential Explanatory Design approach in the form of interviews, observations, and documentation. The analysis uses Signage and Wayfinding theory, Gestalt theory, and Sustainable Design theory. The results of the study indicate that the lack of designer involvement in the process of creating the Governor's Instruction resulted in inconsistent guideline designs that have implications for ambiguous interpretation between government agencies in Bali and designs that are less helpful to road users. Signage design can be evaluated by selecting comprehensive design guidelines and better communication of guidelines. This research is*

*expected to contribute to more accommodating signage design for road users, especially around government agencies in Bali.*

**Keywords:** *design; implementation; signage; bali*

## Pendahuluan

Bali memiliki banyak pesona eksotis meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia yang dikenal adalah budaya Bahasa Bali. Bahasa Bali sebagai bahasa etnis sendiri memiliki sistem penulisan yang unik. Cara penulisan Bahasa Bali bisa menggunakan huruf Latin dan aksara Bali. Fenomena inilah yang dapat dilihat dari desain *signage* instansi pemerintah di Bali dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Menurut Dictionary.com (2024), *Signage* merupakan desain grafis, sebagai simbol, lambang, atau kata-kata, yang digunakan terutama untuk identifikasi atau sebagai sarana untuk memberikan arahan atau peringatan. Calori et al. (2015) menuliskan bahwa *signage* pada umumnya diekspresikan dalam sebuah *sign* yang terpadu dan mengikat sebuah situs.

*Signage* dapat digunakan baik di luar ruangan maupun di dalam gedung. *Signage* yang berada di eksterior gedung sering dirancang untuk menarik perhatian orang dan mengundang mereka untuk masuk. Kemampuan *signage* eksterior dalam menyampaikan informasi kepada pengguna jalan sangat penting, karena dengan hanya dalam waktu yang singkat *signage* harus memberikan informasi yang singkat dan padat kepada pengguna jalan yang melewati area *signage*. Contohnya pengguna jalan yang mencari sebuah instansi yang dapat dibantu oleh *signage* instansi tersebut atau *signage* di sekitar instansi, seperti Kantor Gubernur Bali yang memiliki *signage* tersendiri serta lokasi kantor terletak di sekitar *signage* Lapangan Bajra Sandi. Oleh karena itu, aspek yang penulis teliti adalah aspek Komunikatif (kemudahan dalam menyampaikan informasi secara efektif) dari *signage* eksterior instansi atau umumnya dikenal publik sebagai ‘papan nama kantor’ pemerintah di Bali.

Fenomena rupa *signage* di Bali yang menggunakan dua bahasa sebenarnya bukan hal yang asing bagi khalayak publik, beberapa instansi di Bali menggunakan dua bahasa biasanya menampilkan Bahasa Indonesia dengan bahasa asing luar Indonesia seperti *signage* Kantor Konsulat negara luar di Bali. Namun yang membedakan *signage* tersebut dengan desain *signage* instansi pemerintah di Bali adalah desain *signage* tersebut sudah memiliki regulasi yang berdasar dari Peraturan Gubernur Bali.

Pemerintah melalui Gubernur Wayan Koster menggalangkan program “Perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali”. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali dilakukan berbagai cara. Salah satu cara tersebut adalah dengan menetapkan Peraturan Gubernur No. 80 tahun 2018. Selain itu, Sebagai upaya pelaksanaan peraturan tersebut, Gubernur Bali mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 2331 Tahun 2018. Dalam

instruksi tersebut terdapat juga lampiran yang membahas tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Penggunaan Aksara Bali dan Bahasa Bali. Instruksi ini akan berlaku di seluruh instansi di Bali mulai dari Tingkat Provinsi sampai Desa. Dalam penelitian ini penulis membatasi wilayah penelitian mencakup Kota Madya Denpasar. Setelah peluncuran Instruksi Gubernur No. 80 Tahun 2018, Gubernur Wayan Koster juga menerbitkan Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2020 yang pada BAB X tersebut menjelaskan tentang Papan Nama.

Permasalahan fenomena ini adalah setelah enam tahun Peraturan Gubernur tersebut diluncurkan, desain *signage* yang penulis observasi memiliki beberapa permasalahan. Masalah pertama adalah bagaimana hasil implementasi desain *signage* instansi pemerintah di Bali. Masalah kedua adalah bagaimana faktor-faktor penyebab inkonsistensi desain *signage* instansi pemerintah di Bali. Dan masalah terakhir adalah bagaimana implikasi terhadap keberlanjutan desain antar instansi pemerintah di Bali.

Referensi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah Meutia Braniwati (2023) yang berjudul “Estetika dalam Lokalitas Desain Papan Nama Griya Sekar Wangi Jalan Wonosari Yogyakarta”. Penelitian selanjutnya adalah Sudika Negara (2019) yang berjudul “Prinsip Ergonomi pada Papan Nama Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar”. Penelitian selanjutnya adalah Hananto et al. (2019) yang berjudul “Kajian Desain Environmental Graphic Design Umeda Hospital”. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muekthong (2021) yang berjudul “Study of Signage Design and Information Content for the Namtok Sai Khao National Park”. Penelitian terakhir dilakukan oleh Aprilia (2022) yang berjudul “Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan adapun *novelty* yang dimiliki penelitian ini. *Novelty* (kebaruan) penelitian merupakan sifat kebaruan atau orisinalitas dibandingkan penelitian sebelumnya. Secara garis besar, *novelty* yang didapat pada penelitian ini adalah objek penelitian yaitu *signage* instansi pemerintah di Bali di mana desain *signage* tersebut terikat peraturan pemerintah. Desain *signage* tersebut akan dikaji menggunakan teori desain. Selain itu, implikasi desain *signage* di seluruh instansi pemerintah di Bali akan dikaji menggunakan teori desain keberlanjutan. Sehingga penelitian ini dapat menjawab apakah desain *signage* sudah dianggap membantu atau belum. Jika belum, peneliti akan meneliti kenapa demikian.

Urgensi dari penelitian ini didasari oleh penulis yang tertarik akan desain *signage* instansi pemerintah di Bali. Asumsi penulis terhadap desain *signage* tersebut adalah kurangnya aspek komunikatif yang dapat mengganggu fungsi *signage* memberi informasi secara efektif bagi pengguna jalan. Terlebih desain *signage* ini sudah mulai diadopsi secara luas di luar instansi pemerintah di Bali seperti sekolah, gedung koperasi, sampai kantor kementerian. Topik *signage* yang menggunakan aksara Bali dan huruf Latin bukanlah sesuatu yang jarang dibahas di dunia akademik namun sebagian besar penelitian topik ini hanya berfokus dari perspektif

kajian desain grafis bukan sastra Bali. Alangkah baiknya dengan adanya penelitian ini penulis dapat memberikan saran akan solusi terhadap permasalahan ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka dan teori-teori dalam mendalami fenomena. Beberapa kajian tersebut antara lain, Peraturan Gubernur Bali berupa Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 80, 2018), Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331 Tahun 2018 (Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331, 2018), Peraturan Gubernur Bali No. 6 Tahun 2020 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 6, 2020). Selanjutnya, Tren Desain *Signage* di Bali oleh Suwija (2015), Berikut teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Teori *Signage and Wayfinding* oleh Calori et al. (2015), Teori *Gestalt* oleh Grace Fussell (2024), dan Teori Desain Berkelanjutan oleh Rogers et al. (2024), Jonker (2023) dan Vezzoli et al. (2018).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Mixed Method* atau Metode Kombinasi. Menurut Razali et al. (2023), jika peneliti ingin memperoleh data yang dapat dianalisis secara statistik, maka sebaiknya menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, jika tujuannya adalah untuk memahami suatu fenomena tanpa analisis statistik, pendekatan kualitatif yang lebih tepat untuk digunakan. Pendekatan kualitatif sering digunakan untuk menjawab pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan oleh penelitian kuantitatif dan umumnya diterapkan dalam bidang ilmu sosial atau komunitas. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menangani permasalahan penelitian yang lebih rumit, untuk mendapatkan baik data yang terukur maupun pemahaman yang mendalam, yang dikenal sebagai metode penelitian kombinasi, yakni penggabungan antara cara kuantitatif dan kualitatif. Razali et al. (2023) menjelaskan bahwa peneliti umumnya menentukan desain penelitian berdasarkan isu yang mereka angkat. Istilah metode *sequential* digunakan karena metode yang digabungkan diterapkan secara bertahap. Pendekatan yang dipilih dari penelitian ini adalah *Explanatory Sequential Design* juga dikenal sebagai desain penjelasan berurutan. Desain ini terbagi menjadi dua tahap yang saling terkait. Tahap pertama mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap berikutnya, yang melibatkan pengumpulan data kualitatif.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013), observasi merupakan fondasi dari semua ilmu pengetahuan, karena ia menghasilkan data tentang dunia yang kita huni. Data ini diperoleh melalui pengamatan. Sugiyono (2013) berpendapat wawancara merupakan sebuah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga makna terkait suatu topik dapat dibangun bersama. Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2013), dokumen merupakan kumpulan catatan yang mencerminkan peristiwa-peristiwa dari masa lalu. Proses pengumpulan data dilakukan di beberapa lokasi yang tertera pada Instruksi

Gubernur Bali Nomor 2331 Tahun 2018 (Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331, 2018) antara lain, Kantor Gubernur Bali, Kantor Walikota Denpasar, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Kota Denpasar, RSUD Bali Mandara, dan Sekretariat PHDI Provinsi Bali. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi *signage*, wawancara dengan pegawai pelaksana instansi pemerintah, dan dokumentasi dokumen, artikel, situs, dan buku yang relevan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil Implementasi Desain *Signage***

Desain *signage* instansi pemerintahan di Bali memiliki beberapa perubahan visual dalam kurun beberapa tahun. Sesuai dengan Kajian Pustaka pada bab sebelumnya, desain *signage* instansi pemerintah di Bali mengalami perubahan disebabkan peluncuran peraturan gubernur dan perubahan tren desain. Dalam penelitian ini, variasi rupa perubahan desain *signage* dalam dua periode sebelum (menggunakan aturan Lampiran Surat Edaran Gubernur Bali No. 1 Tahun 1995) dan sesudah peluncuran peraturan gubernur yang baru (Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331 Tahun 2018, dan Peraturan Gubernur Bali No. 6 Tahun 2020).

Variasi rupa *signage* sebelum peraturan baru diperoleh melalui proses Dokumentasi, di mana penulis mengunjungi lokasi penelitian melalui situs *Google Maps Street View* dan memotret rupa *signage* tersebut. Sedangkan, Variasi rupa *signage* setelah peraturan baru diperoleh melalui proses Observasi, di mana penulis mengunjungi lokasi penelitian dan memotret rupa *signage* tersebut. Oleh karena itu, berikut variasi rupa perubahan desain *signage* instansi pemerintah di Bali.

#### *Kantor Gubernur Bali*

Implementasi rupa *signage* Kantor Gubernur Bali pada tahun 2017 menggunakan bahan dan konstruksi kayu dengan warna latar putih. Huruf Latin yang digunakan adalah Arial dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan aksara Bali, serta warna huruf dan aksara adalah hitam. Aksara Bali diletakkan di bawah huruf Latin. Sedangkan *signage* pada tahun 2024 menggunakan bahan dan konstruksi yang sama, namun latar berwarna gradasi merah putih. huruf Latin yang digunakan adalah Arial Black dengan proporsi yang lebih besar dengan aksara Bali. Aksara Bali diletakkan di atas huruf Latin.



Gambar 1. *Signage* Kantor Gubernur Bali tahun 2017 dan 2024

Sumber: Widarma, 2024

### *Kantor Walikota Denpasar*

Implementasi rupa *signage* Kantor Walikota Denpasar pada tahun 2018 menggunakan bahan keramik warna coklat dan konstruksi batu putih. Huruf Latin yang digunakan adalah Arial dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan aksara Bali, serta warna huruf dan aksara adalah emas. Aksara Bali diletakkan di bawah huruf Latin. Sedangkan *signage* pada tahun 2024 menggunakan bahan plat akrilik dan konstruksi batu putih, namun latar berwarna gradasi merah putih. huruf Latin yang digunakan adalah Arial dengan proporsi yang sama besar dengan aksara Bali. Aksara Bali diletakkan di atas huruf Latin.



Gambar 2. *Signage* Kantor Walikota Denpasar tahun 2018 dan 2024

Sumber: Widarma, 2024

### *Sekretariat DPRD Provinsi Bali*

Implementasi rupa *signage* Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada tahun 2017 menggunakan bahan keramik dan batu dengan warna hitam. Huruf Latin yang digunakan adalah Arial dengan warna emas. Aksara Bali diletakkan di bawah huruf Latin. Sedangkan *signage* pada tahun 2024 menggunakan bahan stiker dan konstruksi batu hitam, namun latar berwarna gradasi merah putih. huruf Latin yang digunakan adalah Bookman Old Style dan Times New Roman dengan proporsi sama besar dengan aksara Bali. Aksara Bali diletakkan di atas huruf Latin.



Gambar 3. *Signage* Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2017 dan 2024

Sumber: Widarma, 2024

#### *Sekretariat DPRD Kota Denpasar*

Sekretariat DPRD Kota Denpasar memiliki dua *signage*. Implementasi rupa *signage* A pada tahun 2018 menggunakan konstruksi bahan keramik hitam dan batu bata dengan warna jingga. Huruf Latin yang digunakan pada *signage* tahun 2018 adalah Arial dengan warna emas dengan proporsi huruf Latin lebih besar. Aksara Bali diletakkan di bawah huruf Latin. Implementasi rupa *signage* B pada tahun 2018 menggunakan konstruksi bahan kayu dengan warna putih. huruf Latin yang digunakan pada *signage* tahun 2018 adalah Arial dengan warna hitam dengan proporsi huruf Latin lebih besar. Aksara Bali diletakkan di bawah huruf Latin.



Gambar 4. *Signage* Sekretariat DPRD Kota Denpasar A & B tahun 2018

Sumber: Widarma, 2024

Implementasi rupa *signage* A pada tahun 2024 menggunakan konstruksi bahan plat metal dengan warna gradasi merah putih. Huruf Latin yang digunakan pada *signage* tahun 2024 adalah Arial dengan warna perak. Aksara Bali diletakkan di bawah huruf Latin dengan proporsi sama besar. Implementasi rupa *signage* B pada tahun 2024 menggunakan konstruksi bahan bahan plat metal dengan warna gradasi merah putih. huruf Latin yang digunakan pada *signage* tahun 2024 adalah Arial dengan warna hitam. Aksara Bali diletakkan di atas huruf Latin dengan proporsi sama besar.

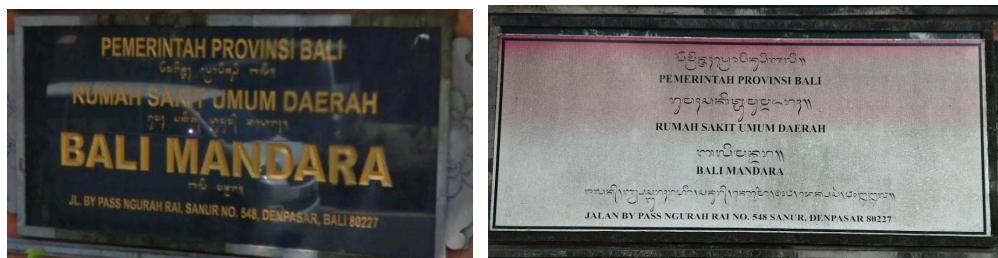


Gambar 5. *Signage* Sekretariat DPRD Kota Denpasar A & B tahun 2024

Sumber: Widarma, 2024

#### *RSUD Bali Mandara*

Implementasi rupa *signage* RSUD Bali Mandara pada tahun 2018 menggunakan bahan keramik hitam dan konstruksi batu. Huruf Latin yang digunakan adalah Arial dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan aksara Bali, serta warna huruf dan aksara adalah emas. Aksara Bali diletakkan di bawah huruf Latin. Sedangkan *signage* pada tahun 2024 menggunakan bahan *flexy* dan konstruksi batu hitam, namun latar berwarna gradasi merah putih. huruf Latin yang digunakan adalah Times New Roman dengan proporsi sama besar dibandingkan dengan aksara Bali. Aksara Bali diletakkan di atas huruf Latin.



Gambar 6. *Signage* RSUD Bali Mandara tahun 2018 dan 2024

Sumber: Widarma, 2024

#### *Sekretariat PHDI Provinsi Bali*

Implementasi rupa *signage* Sekretariat PHDI Provinsi Bali pada tahun 2018 menggunakan bahan plat metal dan konstruksi metal dengan warna latar putih. Huruf Latin yang digunakan pada *signage* tahun 2018 adalah Arial dengan kedua aksara dan huruf menggunakan warna hitam. Sedangkan *signage* pada tahun 2024 berubah menjadi *signage* kompleks terdiri dari beberapa instansi turunan. *Signage* tersebut menggunakan bahan plat akrilik dan konstruksi metal dengan latar berwarna gradasi merah putih. huruf Latin yang digunakan adalah Bookman Old Style dengan proporsi sama besar dibandingkan dengan aksara Bali. Aksara Bali diletakkan di atas huruf Latin.



Gambar 7. *Signage* Sekretariat PHDI Bali tahun 2018 dan 2024

Sumber: Widarma, 2024

Dari hasil observasi variasi rupa *signage* instansi pemerintahan di Bali terdapat diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, keseluruhan *signage* masih menggunakan konstruksi dan posisi instalasi sebelumnya kecuali Sekretariat PHDI Provinsi Bali yang mengganti konstruksi baru yaitu dari satu atap menjadi satu kompleks. Kedua, penerapan Peraturan Gubernur terhadap rupa *signage* yang dapat dinilai sebagai aksi pelestarian budaya yang menggolongkan *signage* dalam wujud budaya sebagai sistem aktivitas dengan unsur bahasa, sosial, teknologi dan seni. Ketiga, dengan adanya peraturan tersebut, rupa *signage* akhirnya mendapatkan unsur keseragaman desain di mana sebagian besar *signage* menggunakan warna latar dan teks yang sama, serta letak aksara yang sama rata bagi seluruh instansi.

### Faktor-faktor Penyebab Inkonsistensi Desain *Signage*

Proses analisis desain *signage* instansi pemerintah di Bali menggunakan teori *Gestalt*, dan Peraturan Gubernur yang dipaparkan menggunakan metode *Signage Pyramid*. Sesuai dengan kajian teori, teori *Gestalt* digunakan untuk menganalisis konsistensi, efektivitas, serta mengetahui adanya faktor penyebab inkonsistensi antar desain *signage*. Proses analisis keseluruhan variabel konsistensi desain *signage* dilakukan dengan melakukan kompilasi seluruh analisis desain *signage* sesuai dengan metode *Signage Pyramid* (*Information Content System*, *Graphic System*, dan *Hardware System*) mengecek bahwa *signage* telah memiliki variabel yang ditanya atau belum (✓ atau ✗). Lalu data variabel akan dihitung dan ditampilkan dalam bentuk persentase, seperti 4 dari 5 variabel terpenuhi sehingga didapat nilai 80%.

Dimulai dari *Information Content System* membahas tentang kelengkapan informasi *signage* yang menggunakan 5 variabel antara lain, Logo Instansi, Nama Instansi, Alamat, No. Telepon, dan Nama Tempat. Selanjutnya *Graphic System* membahas tentang kelengkapan aspek grafis *signage* yang menggunakan 5 variabel antara lain, *Legibility* antara Huruf dan

Aksara, *Legibility* antara Teks dari Jarak Jauh, Ergonomi Teks pada Latar, Hierarki Pesan Jelas dan Kontras Huruf dan Latar. Terakhir, *Hardware System* membahas tentang kelengkapan konstruksi dan daya tahan *signage* yang menggunakan 4 variabel antara lain, Keamanan *Signage*, Keamanan Huruf, Proteksi UV, dan Proteksi Vandalsme.

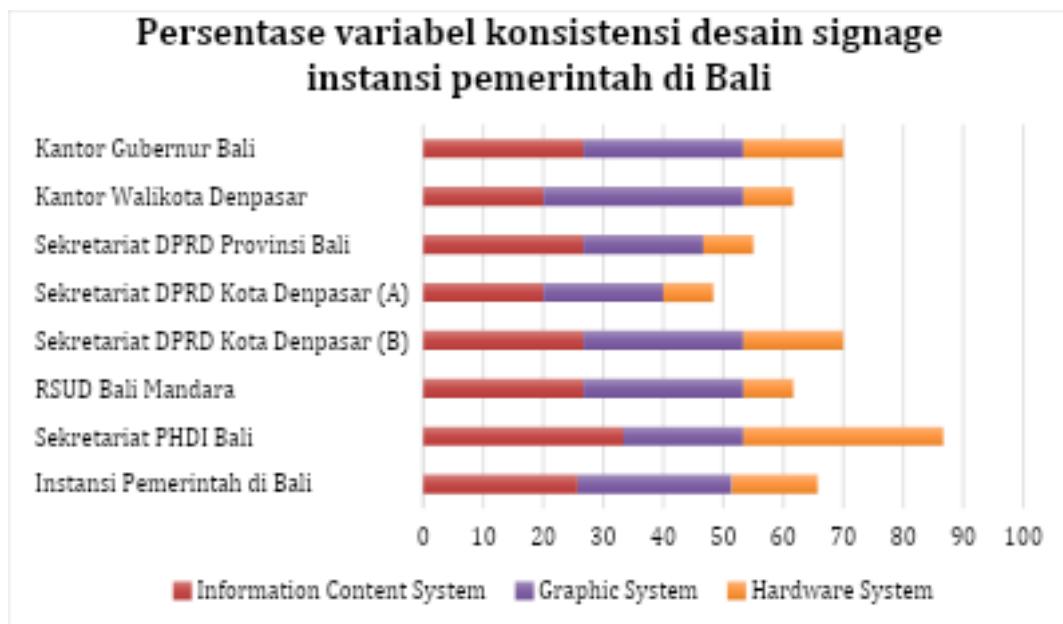
Dalam proses analisis ini, terdapat penilaian terhadap *signage* yang telah memenuhi kriteria variabel. Penilaian tersebut ditampilkan dalam bentuk persentase. Oleh karena itu, berikut makna penilaian persentase analisis: 0% - 25% berarti Sangat Buruk, 26% - 50% berarti Buruk, 51% - 75% berarti Baik, 76% - 100% berarti Sangat Baik. Berikut hasil analisis *signage* tersebut.

**Tabel 1.** Analisis variabel desain keseluruhan *signage*

Lokasi	Data			Total (%)
	<i>Information Content System</i>	<i>Graphic System</i>	<i>Hardware System</i>	
Kantor Gubernur Bali	80%	80%	50%	<b>70%</b>
Kantor Walikota Denpasar	60%	100%	25%	<b>61%</b>
Sekretariat DPRD Provinsi Bali	80%	60%	25%	<b>55%</b>
Sekretariat DPRD Kota Denpasar (A)	60%	60%	25%	<b>48%</b>
Sekretariat DPRD Kota Denpasar (B)	80%	80%	50%	<b>70%</b>
RSUD Bali Mandara	80%	80%	25%	<b>61%</b>
Sekretariat PHDI Bali	100%	60%	100%	<b>86%</b>
<b>Instansi Pemerintah di Bali</b>	<b>77%</b>	<b>74%</b>	<b>42%</b>	<b>64%</b>
<b>Total persentase variabel konsistensi desain Signage instansi pemerintah di Bali</b>				

Sumber: Widarma, 2025

**Bagan 1.** Analisis variabel desain keseluruhan *signage*



**Sumber:** Widarma, 2025

Terakhir, analisis variabel desain desain *signage* dapat disimpulkan bahwa variabel desain *signage* Jadi dapat disimpulkan bahwa total analisis variabel desain *signage* instansi pemerintah di Bali adalah 64% (di atas rata-rata). Kedua variabel Metode *Signage Pyramid* (Calori et al., 2015) pada analisis sudah melebihi nilai rata-rata. Variabel yang menjadi masalah adalah Hardware System (42%). Hal ini dapat menjadi faktor terhadap inkonsistensi desain terutama konstruksi media cetak *signage* yang tidak dapat bertahan lama sehingga harus mendapatkan perawatan yang lebih rutin.

### Implikasi Keberlanjutan Desain *Signage*

Proses analisis implikasi dilakukan dengan mengolah data wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yang terkait dengan informasi yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah di wilayah Denpasar. Berikut beberapa hasil wawancara tersebut.

Argumen pertama adalah pernyataan narasumber Sekretariat PHDI Bali yaitu desain *signage* yang menggunakan gradasi dapat memberikan rupa *signage* lebih mencolok ke pengguna jalan (Budi Artana, 2024). Ditambah lagi artikel “Kajian Desain *Environmental Graphic Design Umeda Hospital*” (Hananto et al., 2019) yang menjelaskan desain *signage* yang memiliki satu kesatuan tema. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan narasumber Kantor Walikota Denpasar yaitu penggunaan gradasi warna pada desain *signage* menyebabkan teks yang berwarna hitam sulit dibaca (Swi Putra, 2025). Ditambah lagi artikel “*Study of Signage Design and Information Content for the Namtok Sai Khao National Park*” (Muekthong, 2021)

yang menjelaskan pentingnya aspek keterbacaan terhadap *signage* yang memiliki lebih dari 2 bahasa.

Argumen kedua adalah pernyataan narasumber Sekretariat PHDI Bali yaitu penggunaan warna latar merah putih memberikan kesan instansi memiliki asosiasi dengan kenegaraan (Budi Artana, 2024). Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan narasumber Kantor Walikota Denpasar yaitu penggunaan warna merah yang dapat luntur menjadi kuning sampai putih akibat paparan sinar matahari (Swi Putra, 2025). Pernyataan ini diperkuat oleh Tren Desain *Signage* di Bali (Suwija, 2015) yang memperlihatkan bahwa desain lama *signage* mampu bertahan selama 23 tahun sebelum diubah karena persoalan budaya meskipun rendahnya hubungan warna latar dengan pelestarian budaya.

Argumen ketiga adalah pernyataan narasumber Sekretariat PHDI Bali yaitu peletakan Aksara Bali di atas huruf Latin memberikan nuansa budaya yang lebih diprioritaskan yang sesuai dengan citra Provinsi Bali (Budi Artana, 2024). Pernyataan ini diperkuat oleh artikel “Estetika dalam Lokalitas Desain Papan Nama Griya Sekar Wangi Jalan Wonosari Yogyakarta” (Braniwati, 2023) yang menjelaskan lokalitas sebuah budaya dapat dicantumkan ke dalam desain *signage*. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan narasumber Kantor Walikota Denpasar yaitu dengan mengharuskan seluruh informasi memiliki versi aksara bali, menyebabkan terlalu banyak informasi pada ruang terbatas sehingga beberapa informasi dihapus (Swi Putra, 2025). Ditambah lagi, artikel “Prinsip Ergonomi pada Papan Nama Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar” (Sudika Negara, 2019) yang menjelaskan pentingnya aspek ergonomi pada *signage* terutama jumlah informasi yang ditampilkan.

Kedua narasumber sama-sama memiliki beberapa argumen kritik terhadap Peraturan Gubernur. Pernyataan pertama adalah penggunaan biaya dari setiap instansi menyebabkan kualitas *signage* inkonsisten. Pernyataan kedua adalah rendahnya rentang waktu eksekusi desain *signage* menyebabkan perawatan yang lebih rutin. Pernyataan ketiga adalah kurangnya komunikasi dari pihak Gubernur ke instansi lain menyebabkan pegawai pelaksana hanya mengikuti atasan tanpa masukan dari pegawai pelaksana. Seluruh argumen di atas memiliki dasar dalam artikel “Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik” (Aprilia, 2022) di mana peran komunikasi Gubernur Bali dapat mewujudkan *good governance* melalui proses diseminasi kebijakan desain *signage*, terlebih *signage* yang membantu navigasi pengguna jalan termasuk pelayanan publik.

Dalam teori Desain Berkelanjutan (Jonker, 2023), fenomena ini menyinggung *Triple Bottom Line*, dimana proses desain harus mempertimbangkan 3 aspek yaitu *People*, *Planet* dan *Profit*. Dimulai dari *People* merujuk kepada pegawai pelaksana sampai pengguna jalan, di mana desain *signage* harus mempertimbangkan komunikasi panduan desain (Peraturan Gubernur) ke pegawai pelaksana sampai produksi desain *signage* yang akan digunakan pengguna jalan.

*Planet* merujuk pada dampak *signage* terhadap lingkungan dengan fokus terhadap pemilihan bahan cetak *signage*, di mana pemilihan bahan cetak akan berpengaruh terhadap proses pemeliharaan mulai pemasangan *signage* baru sampai pembuangan *signage* yang sudah tidak layak pakai. Dan terakhir *Profit* yang merujuk pada pengelolaan modal produksi sampai pemeliharaan, di mana dengan memilih bahan cetak yang tahan lama dapat mengurangi jumlah biaya pemeliharaan dan frekuensi pergantian *signage*. Solusi yang dapat ditarik dari fenomena di atas adalah penggunaan Desain Universal (Vezzoli et al., 2018), di mana desain *signage* yang didesain bersifat universal yang bisa diterapkan secara adaptif di berbagai jenis konstruksi mulai dari *signage* tunggal sampai kompleks. Selain itu, desain Berpusat ke Manusia (Vezzoli et al., 2018) dengan fokus ke manusia dengan segala keterbatasannya terutama spektrum disabilitas visual (buta warna, penglihatan rendah, dan kebutaan).

### **Solusi Desain *Signage***

Solusi desain akan dipaparkan dengan menggunakan Metode *Signage Pyramid* dari Teori *Signage and Wayfinding* (Calori et al., 2015).

#### Information Content System

#### *Konten Informasi*

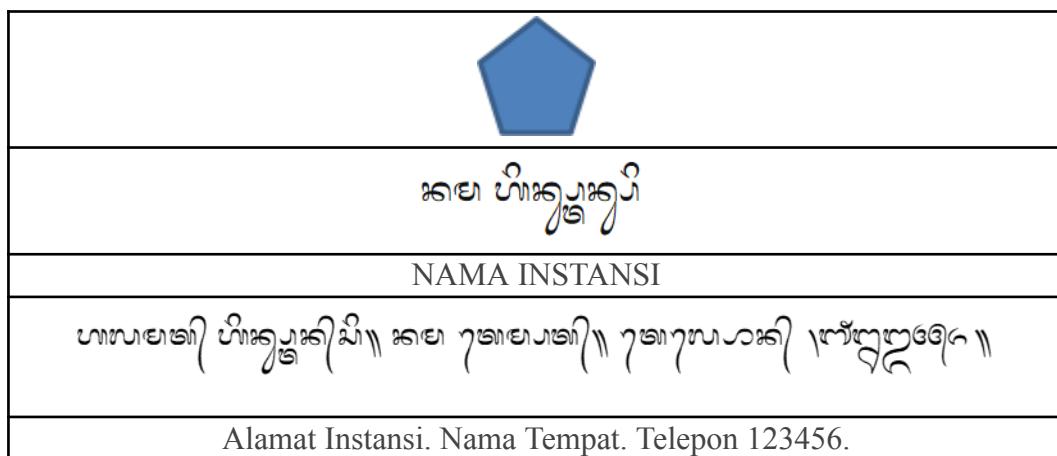
Berikut konten informasi yang penulis sarankan pada desain *signage* antara lain, Logo Instansi, Nama Instansi, Alamat Instansi, Nama Tempat, dan Nomor Telepon. Konten informasi di atas memiliki beberapa catatan. Pertama, dalam beberapa kasus *signage* memiliki nama instansi lebih dari satu. Sebagian besar terjadi karena instansi pemerintah merupakan turunan instansi pemerintah lebih tinggi. Oleh Karena itu, Nama instansi majemuk dibagi menjadi Nama Instansi Utama dan Nama Instansi Tambahan. Hal ini akan berpengaruh terhadap hierarki pesan. Kedua, konten informasi Alamat Instansi, Nama Tempat, dan Nomor Telepon ditempatkan dalam satu baris. Ketiga, semua informasi konten memiliki versi Aksara Bali diberi spasi tiap kata untuk memudahkan aspek baca. Keempat, informasi konten dapat disingkat demi penggunaan ruang yang lebih efektif.

#### *Layout Konten Informasi*

Dari proses observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan, terdapat dua *layout* konten informasi yaitu, Vertikal Penuh dan Kop Surat. Vertikal Penuh menyusun semua konten informasi secara vertikal dimulai dari Logo, Nama Instansi, Alamat Instansi, Nama Tempat dan Nomor Telepon. Sedangkan, Kop Surat menyusun konten informasi Logo Instansi dan

Nama Instansi bersebelahan yang dilanjutkan dengan Alamat Instansi, Nama Tempat dan Nomor Telepon di bawah. Penggunaan *Layout* Konten Informasi digunakan sesuai dengan ukuran *signage* yang sedang didesain.

**Bagan 2** Layout Konten Informasi *Signage* dalam bentuk Vertikal Penuh



**Sumber:** Widarma, 2025

**Bagan 3** Layout Konten Informasi *Signage* dalam bentuk Kop Surat



**Sumber:** Widarma, 2025

### *Graphic System*

Untuk mempertahankan kualitas dari desain *signage*, tidak kalahnya desainer menggunakan kanvas desain yang memiliki ukuran sedikit lebih besar dari ukuran *signage*, serta kanvas desain memiliki kerapatan *pixel* sebesar 300 ppi (*pixel per inch*) sehingga hasil cetak *signage* tetap terlihat tajam.

- Tipografi

*Font* yang akan digunakan dalam desain *signage* pada bagian informasi konten huruf Latin adalah Helvetica Now. Helvetica Now merupakan versi Helvetica yang diluncurkan pada tahun 2019. Menurut Monotype (2024), perencanaan dan desain Helvetica Now dimulai pada Desember 2014 dengan tujuan menciptakan Helvetica yang memenuhi kebutuhan para desainer dan kreator masa kini. Untuk proses desain *signage* penulis menyarankan Helvetica Now Display karena Display diperuntukkan untuk media dengan ukuran besar. Dikarenakan Helvetica Now memiliki rentang berat *font* yang luas, penulis menyarankan berat *font* yang digunakan mulai dari Medium, Bold, Extra Bold, dan Black.

*Font* yang akan digunakan dalam desain *signage* pada bagian informasi konten huruf Latin adalah Bali Simbar Dwijendra. Bali Simbar Dwijendra merupakan variasi baru font Bali Simbar yang diluncurkan pada tahun 2021. Menurut Yayasan Dwijendra Denpasar (2023), Bali Simbar Dwijendra diciptakan untuk mempercepat distribusi aksara Bali bagi umat Hindu, baik yang tinggal di Provinsi Bali maupun yang berada di luar wilayah Bali. Salah satu peningkatan yang dimiliki adalah berat *font* yang lebih tebal dari versi sebelumnya. Terlebih Bali Simbar Dwijendra didampingi *software* yang dapat membantu proses penulisan aksara Bali.

- Warna dan Gradasi

Sesuai dengan Instruksi Gubernur Bali, pemilihan warna *signage* antara lain latar merah dan putih, dan teks hitam (Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331, 2018). Selain itu, penggunaan gradasi ditekankan desain *signage* menyebabkan adanya warna tambahan gradasi merah muda. Gradasi merah muda muncul saat warna merah dicampur warna putih dengan rasio 1:1. Warna inilah yang sebagian besar akan kerap dijumpai dalam desain *signage*. Skala gradasi merupakan seberapa besar transisi warna yang terjadi dalam desain. Penulis menyarankan skala gradasi sebesar 80% dengan total rasio merah (#ff0000): Gradasi merah muda (#ff8080): putih (#ffffff) sebesar 10:80:10 dikarenakan gradasi merah muda memiliki kontras yang lebih baik saat dipadu padankan dengan warna hitam (#000000).

- Hirarki

Hirarki desain merupakan tahapan penting dalam proses desain *signage*. Hirarki memberikan prioritas baca pada informasi konten *signage*. Dengan adanya hirarki, pengguna jalan dapat memiliki jalur baca yang jelas. Cara menambahkan hirarki pada desain dapat dilakukan dengan mengubah ukuran dan berat *font*. Berikut contoh desain *signage* yang sudah ditambahkan hirarki desain.

**Bagan 4** Contoh desain *signage* yang menggunakan layout Kop Surat



**NAMA INSTANSI**

କାନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ

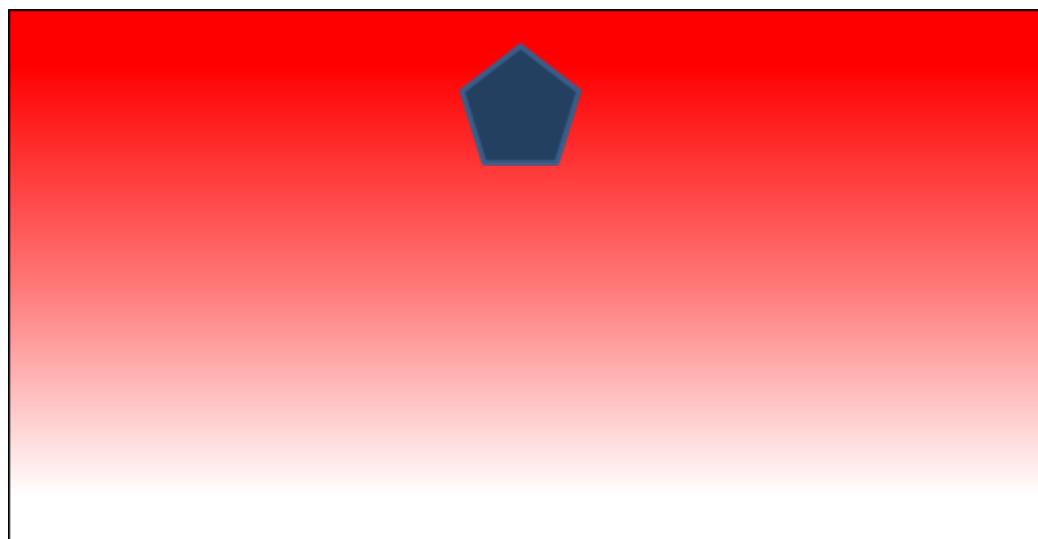
**NAMA INSTANSI**

ଶାଖାକ୍ଷର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ । କାନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ । କାନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ।

Alamat Instansi. Nama Tempat. Telpon 123456.

Sumber: Widarma, 2025

**Bagan 5** Contoh desain *signage* yang menggunakan layout Vertikal Penuh



କାନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ

**NAMA INSTANSI**

କଲା ପିଲ୍ଲାଙ୍ଗୁଳୀ

## NAMA INSTANSI

ବାଷଳାତି ପିଲ୍ଲାଙ୍ଗୁଳୀମ୍ବି । କଲା ଗାସଲାତି । ଗାସଲାତି ହେଁଲ୍ଲାଙ୍ଗୁଳୀ

Alamat Instansi. Nama Tempat. Telepon 123456.

Sumber: Widarma, 2025

Hirarki di atas memiliki beberapa catatan. Pertama, sesuai dengan Instruksi Gubernur Bali, penulisan aksara/huruf Bali ditempatkan di atas huruf Latin dan komposisi/ukuran aksara/huruf Bali harus berimbang dengan ukuran huruf Latin (Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331, 2018). Posisi aksara Bali berada di atas huruf Latin dan informasi konten disusun secara tengah atau center. Kedua, prioritas baca *signage* adalah Nama Instansi (utama) > Logo Instansi > Nama Instansi (tambahan) > Alamat = No. Telepon = Nama Tempat. Terlebih jika menggunakan rumus tinggi huruf minimum dalam desain, prioritaskan pada Nama Instansi (utama). Ketiga, jika informasi konten hanya menghabiskan ruang desain yang sedikit, penulis menyarankan untuk meningkatkan jarak antar kata daripada mengubah ukuran huruf diluar skala atau *typeface stretching*. Hal ini dikarenakan bahwa desain harus mengikuti Instruksi Gubernur Bali Penulisan aksara/huruf dilakukan dengan memperhatikan kualitas, etika dan estetika (Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331, 2018).

Hardware System

*Media Cetak*

Untuk mempertahankan konsistensi desain *signage*, penulis menyarankan menggunakan bahan plastik plat akrilik *glossy* dengan teknik cetak. Plat akrilik dipilih karena ketahanannya terhadap paparan cuaca dan teknik cetak *digital print* dipilih karena kemudahan dibandingkan dengan lukisan tangan serta hasilnya bisa dikontrol, cepat, dan mudah. Bagi desain *signage* yang ingin menggunakan huruf timbul maka dapat menggunakan pengaturan latar beserta teks dengan plat akrilik *glossy* dan huruf timbul dengan plat akrilik *doff*. Hal ini diharapkan dapat menanggulangi disaat huruf timbul jatuh *signage* tetap terbaca dan memudahkan pemasangan huruf timbul dengan adanya area pemasangan. Terlebih penggunaan plat akrilik *glossy* dan *doff* dapat memberikan kontras yang lebih baik antara latar dan teks.

### *Proteksi*

Proteksi *signage* dari paparan cuaca merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keawetan *signage*. Salah satu cara meningkatkan proteksi *signage* adalah menggunakan tinta tahan sinar UV/Matahari. Hal ini dapat didiskusikan dengan rekanan pencetakan *signage*. Selain itu, menggunakan Pelapis Tembus atau *Clear Coating* dapat menjadi solusi proteksi ringan. Dengan jumlah modal yang terbatas, penulis dapat menyarankan menggunakan Cat Semprot dengan warna *Clear*. Selain itu, cat semprot *Clear* memiliki beberapa jenis antara lain *Glossy* dan *Doff*. Kedua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. *Glossy* memberikan proteksi yang baik namun butuh pembersihan yang lebih rutin. Sedangkan, *Doff* proteksi yang kurang baik namun butuh pembersihan yang lebih jarang.

### **Kesimpulan dan Saran**

Hasil implementasi desain *signage* instansi pemerintah di Bali dimulai dari peluncuran Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331 Tahun 2018, dan Peraturan Gubernur Bali No. 6 Tahun 2020 yang menggantikan Lampiran Surat Edaran Gubernur Bali No. 1 Tahun 1995 menyederhanakan rupa desain *signage* dengan membatasi rupa desain. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan rupa detail desain *signage* di lapangan.

Analisis faktor-faktor inkonsistensi peraturan gubernur pada desain *signage* dilakukan dengan metode *Pyramid Signage*. hasil yang didapat adalah keseluruhan *signage* instansi pemerintah di Bali sebagian besar memiliki skor di atas rata-rata. Namun, terdapat masalah yang terfokus terhadap keamanan media cetak *signage* di lapangan.

Analisis implikasi keberlanjutan desain *signage* dilakukan dengan menyusun kronologi peraturan gubernur tentang desain *signage*. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis implikasi desain melalui wawancara yang dilakukan kepada pegawai pelaksana, serta membandingkan argumen pro, kontra, dan kritik terhadap desain *signage* yang selanjutnya diolah menggunakan teori Desain Berkelanjutan.

Solusi desain yang dapat diterapkan adalah menerapkan pedoman yang jelas terhadap *signage*. Mulai dari *Content Information System* yang disusun dengan jelas, *Graphic System* yang memilih tipografi, warna, dan, hierarki pesan serta *Hardware System* yang memilih bahan cetak, teknik cetak, dan perlindungan *signage*.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penelitian ini. Pertama ucapan terima kasih kepada I Wayan Swi Putra selaku Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Kedua ucapan terima kasih kepada I Gede Budi Artana selaku Wakil Sekretaris II Bidang Organisasi dan Bagian Umum Sekretariat PHDI Provinsi Bali. Kedua narasumber berikut sudah sangat membantu penulis dalam dukungan, dorongan dan diskusi pengumpulan data. Proses wawancara dilakukan di instansi narasumber masing-masing antara lain, Kantor Walikota Denpasar dan Sekretariat PHDI Provinsi Bali.



**Gambar 8.** Wawancara dengan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar (I Wayan Swi Putra)

Sumber: Widarma, 2025



**Gambar 9.** Wawancara dengan Wakil Sekretaris II Bidang Organisasi dan Bagian Umum Sekretariat PHDI Provinsi Bali (I Gede Budi Artana)

Sumber: Widarma, 2024

## Daftar Pustaka

- Aprilia, I. A. (2022). Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Communication*, 13(1), 70. <https://doi.org/10.36080/comm.v13i1.1576>
- Braniwati, M. (2023). Estetika Dalam Lokalitas Desain Papan Nama Griya Sekar Wangi Jalan Wonosari Yogyakarta. *DESKOVI: Art and Design Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.51804/deskovi.v6i2.14239>
- Budi Artana, I. G. (2024). *Wawancara Wakil Sekretaris II Bidang Organisasi dan Bagian Umum Sekretariat PHDI Provinsi Bali*. Aditya Widarma, I Made.
- Calori, C., Vanden-Eynden, D., Geismar, T., & Chermayeff, I. (2015). *Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design Systems, Second Edition*. John Wiley and Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119174615>
- Dictionary.com. (2024). *SIGNAGE Definition & Meaning* | Dictionary.com. <https://www.dictionary.com/browse/signage>
- Grace Fussell. (2024). *Gestalt Principles in Design: What Is the Gestalt Theory?* <https://www.shutterstock.com/blog/gestalt-theory-in-design>
- Hananto, B. A., Timothy, E., Krisananda, R., & Stefanus, T. (2019). *KAJIAN DESAIN ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN UMEDA HOSPITAL*. 1(2), 177–190.
- Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali Secara Serentak di Seluruh Bali, Pub. L. No. 2331 (2018).
- Jonker, A. (2023, December 1). *Apa itu triple bottom line?* | IBM. <https://www.ibm.com/id-id/topics/triple-bottom-line>
- Monotype. (2024, June). *Helvetica Now* | Monotype. <https://www.monotype.com/fonts/helvetica-now>
- Muekthong, T. (2021). Study of signage design and information content for the Namtok Sai Khao National Park. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 881(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/881/1/012006>
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Provinsi Bali, Pub. L. No. 6 (2020).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Pub. L. No. 80 (2018).
- Razali, G., Syamil, A., & Hurit, R. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi* (S. Bahri, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Rogers, J., Gomstyn, A., & Jonker, A. (2024, June 5). *Apa itu Desain Berkelanjutan?* | IBM. <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/sustainable-design>
- Sudika Negara. (2019). Prinsip Ergonomi Pada Papan Nama Fakultas Seni Rupa Dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar I Nengah Sudika Negara. *PRABANGKARA Jurnal Seni Rupa Dan Desain*, 23(1), 6–10. [www.akademica.education](http://www.akademica.education),
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alphabeta.

Suwija, I. N. (2015). *Pasang Aksara Bali* (I. N. Suwija, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Pelawa Sari.

Swi Putra, I. W. (2025, March 20). *Wawancara Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar*. Aditya Widarma, I Made.

Vezzoli, C., Ceschin, F., Osanjo, L., M'rithaa, M. K., Moalosi, R., Nakazibwe, V., & Diehl, J. C. (2018). *Designing Sustainable Energy for All: Sustainable Product-Service System Design Applied to Distributed Renewable Energy*. Springer.

Yayasan Dwijendra Denpasar. (2023). *Bali Simbar Dwijendra – SMP Dwijendra Denpasar*.  
<https://smpdwijendra.sch.id/bali-simbar-dwijendra/>